



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PUTU ARNATA
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 662686

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 625.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 94 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , WARISAN Rp. 625.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 4.900.000

1. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOTOR, HONDA MATIK Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 2.400.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 6.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. ---

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 636.400.000

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 636.400.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I WAYAN SUDARSANA
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 637212

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 427.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/42 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 427.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 148.600.000

1. MOTOR, HONDA NC11BF1D A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 2.750.000
2. MOTOR, SUZUKI UW 125 SC Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 1.850.000
3. MOTOR, YAMAHA SE66 / SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
4. MOBIL, TOYOTA SEDAN Tahun 1975, HASIL SENDIRI Rp. 500.000
5. MOTOR, YAMAHA B3F-IAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
6. MOTOR, YAMAHA LEXI S-ABS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
7. MOBIL, DIHATSU MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 94.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 12.840.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.585.184

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 593.525.184



III. HUTANG

Rp.

340.090.258

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

253.434.926

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I NYOMAN GEDE PUTRA WIRATMA
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 656174

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 8.750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 950 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , WARISAN Rp. 8.050.000.000
2. Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 170.000.000

1. MOBIL, SUZUKI TM2FX (4X2) A/T / MINIBUS-001 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, HONDA NC11D1D A/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA NC11D1D A/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOTOR, HONDA E1F02N11M2A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 6.400.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 11.022.255

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 8.937.422.255

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 8.937.422.255

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DEWA AYU AGUNG MANIK OKTARIANI
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 622505

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	67.000.000
1. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2009, HASIL SENDIRI	Rp.	
4.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2011, HASIL SENDIRI	Rp.	
3.000.000		
3. MOBIL, DAIHATSU MATIC Tahun 2015, HASIL SENDIRI	Rp.	
60.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	6.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	9.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	82.000.000

III. HUTANG Rp. 49.200.000

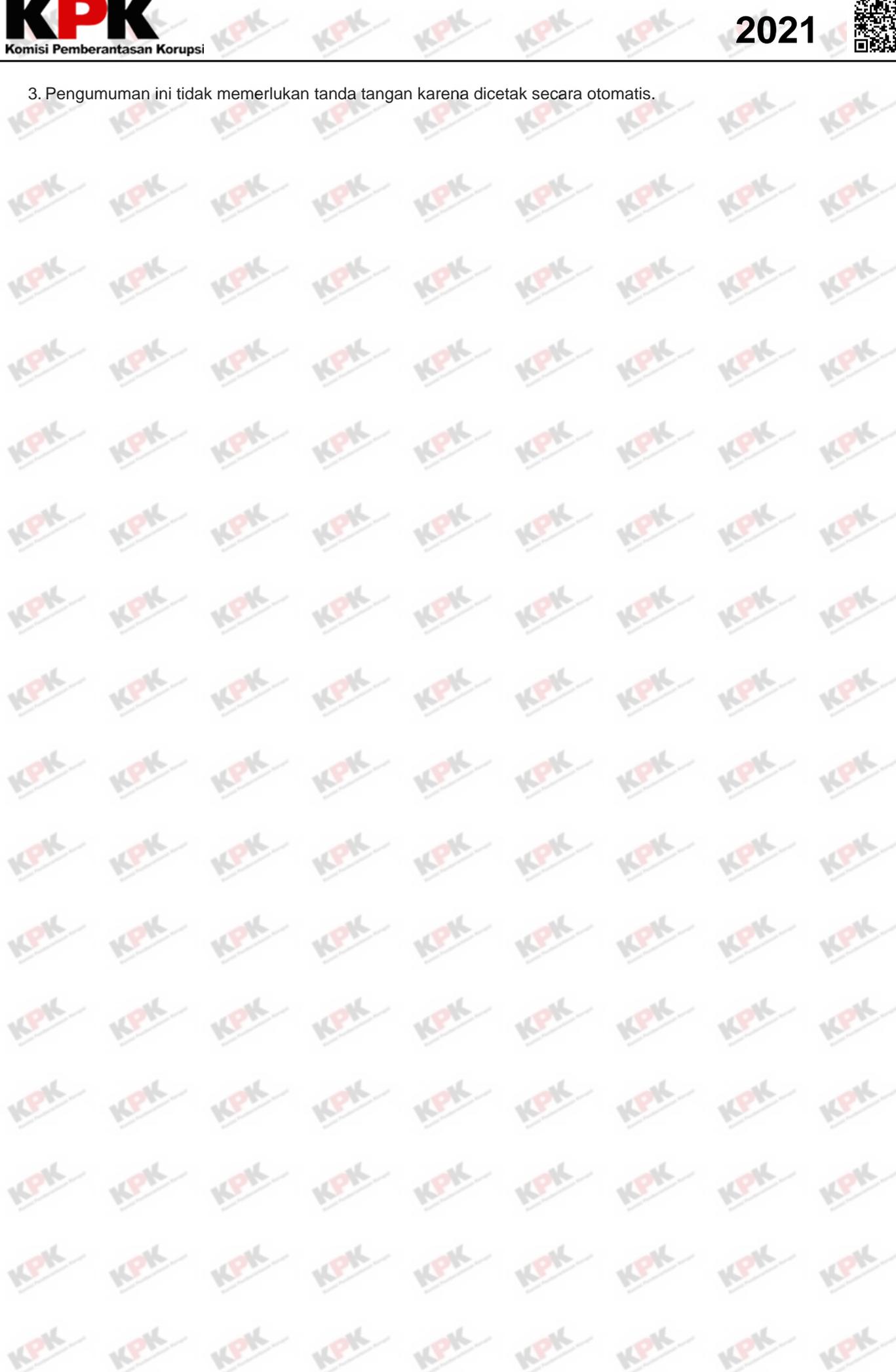
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 32.800.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ACHMAD BAIDHOWI
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 693235

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	13.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2011, HASIL SENDIRI	Rp.	
5.500.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI	Rp.	
7.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	----
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	13.000.000
III. HUTANG	Rp.	17.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-4.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NI WAYAN ERNIRUSITA
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 631312

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. ----

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 107.000.000

1. MOBIL, SUZUKI SWIFT Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 18.803.107

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 125.803.107

III. HUTANG Rp. 125.622.472

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 180.635

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

